



RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2021

BAPPENDA NTB



Jl. Majapahit No.17 Telp. 0370-631502 - 631724, Fax. 0370-641151 Mataram (83117)
e-Mail: bappenda@ntbprov.go.id, www.bappenda.ntbprov.go.id



[bappenda.ntb](https://www.facebook.com/bappenda.ntb)

[bappenda.ntb](https://www.instagram.com/bappenda.ntb)

[@bappenda.ntb](https://twitter.com/bappenda.ntb)

www.bappenda.ntbprov.go.id

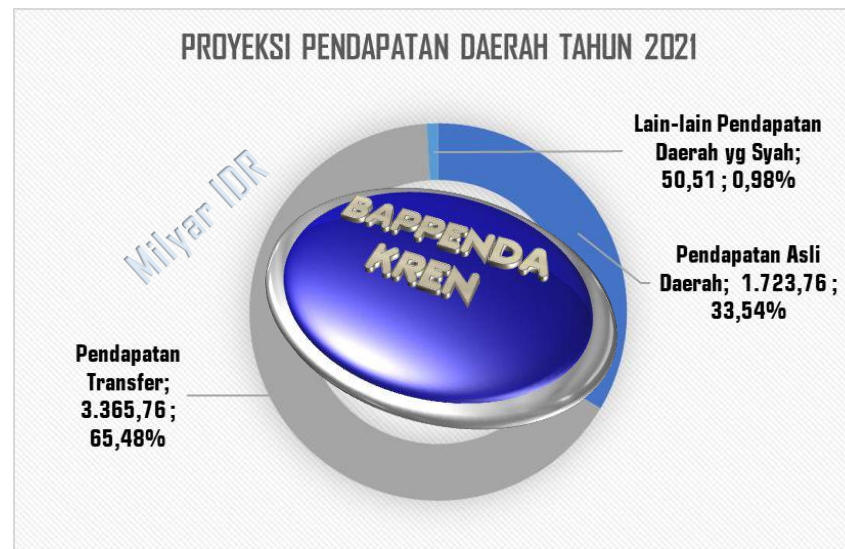
bappenda@ntbprov.go.id

RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2021



BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
JL. MAJAPAHIT 17 MATARAM (83117)

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan kurunia serta perkenan-Nya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menyelesaikan penyusunan revisi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021. Rencana kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rancangan Awal Rencana Strategis Bappenda Provinsi NTB Tahun 2018-2023 dengan mempertimbangkan pokok-pokok arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Revisi Rencana Kerja Bappenda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 menitik beratkan pencapaian keseimbangan secara proporsional antara upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah, Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat, memantapkan Kinerja Sumber Daya Manusia dan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Tahun ini merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan Renstra Bappenda Tahun 2019-2023, dimana pada Renja 2021 ini telah disesuaikan dengan kondisi yang sedang kita hadapi di tahun anggaran berjalan ini (pandemik Covid-19) dan yang akan kita hadapi pada tahun mendatang dengan mengacu pada ketentuan Peraturan yang berlaku.

Diharapkan Renja Bappenda Provinsi NTB ini dapat memberikan sumbangsih dalam proses pencapaian Visi NTB Gemilang dan Misi NTB Bersih dan Melayani melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi, khususnya bagi Bappenda Provinsi NTB yang mengusung sasaran penguatan fiskal daerah dengan indikator Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, serta dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Demikian Renja yang kami buat, semoga bermanfaat khususnya bagi Bappenda Provinsi NTB dalam rangka mewujudkan tatakelola yang baik (*good governance*).

Mataram, Maret 2020
Kepala Bappenda Provinsi NTB

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si.
NIP. 19651231 199403 1 153

DAFTAR ISI

Halaman Depan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
 BAB I Pendahuluan	 1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	20
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
 BAB III Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan	 34
3.1 Telaahan Terhadap Kebijkasanaan Nasional	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	34
3.3 Program dan Kegiatan	35
 BAB IV Penutup	 42
Lampiran-Lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mempertimbangkan arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 dan merupakan bagian integral dalam implementasi rencana strategik yang tertuang dalam penjabaran dari program-program dan kegiatan-kegiatan strategik dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, dan memiliki kesamaan perspektif terkait dengan maksud, tujuan, dan karakteristik program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategik yang diarahkan.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 memuat rancangan program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra 2019–2023 dengan mempertimbangkan kerangka kebijakan pendanaan dan pagu indikatif dalam Rancangan RKPD Provinsi NTB Tahun 2021, yang mengusung tema “*Menuju NTB Gemilang Dengan Membangun Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Nilai Tambah Industri, Pariwisata, Investasi dan Sistem Kesehatan Daerah*”. Berdasarkan acuan tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan wujud dari pola perencanaan partisipatif sehingga menciptakan sebuah komitmen yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mitra terkaitnya.

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah eksistensi dalam meningkatkan pendapatan untuk kebutuhan pendanaan pembangunan daerah dalam pencapaian target-target makro pembangunan daerah, sehingga diperlukan adanya penajaman penanganan pada institusi pendapatan yang menyangkut peningkatan pelayanan, kualifikasi SDM, standarisasi sarana kerja, penguatan tata laksana dan akuntabilitas manajemen pendapatan dalam mengoptimalkan kinerjanya. Serta mulai mempertajam pemanfaatan teknologi informasi yang harus sejalan dengan pola layanan perbankan, yang makin erat dengan tata kelola penerimaan dan pencatatan pendapatan daerah. Bappenda Provinsi NTB sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan



Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan diubah menjadi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2017 tentang hal yang sama, untuk membantu Gubernur melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, menyelenggarakan fungsi menyusun kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, melaksanakan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Renja Bappenda tahun 2021 juga mengacu kepada migrasi sistem pengelolaan keuangan daerah dari Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menuju Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam kerangka percepatan kinerja pengelolaan pendapatan, Bappenda mencanangkan Tiga Opsi yang memuat : (1) Penguatan soliditas aparatur, (2) Penguatan akses pelayanan pendapatan yang makin mudah, nyaman & aman serta (3) Pengelolaan seluruh potensi pendapatan daerah yang makin rasional dan terukur. Ketiga prakarsa Bappenda tersebut, akan terus diperkuat dengan penanaman spirit terhadap nilai nilai organisasi yang sekaligus menjadi kunci kepemimpinan bersama dan diharap mampu menjadi daya ungkit dalam mempengaruhi keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi, yang memuat : Integritas (*Integrity*), Harmonis (*Harmonically*), Sinergis (*Sinergic*), Amanah (*trusteeship*), serta Niat (*Aim*), yang disingkat menjadi IHSAN. Didongkrak pula dengan semangat Kuat, Responsive, Electronic Devices, dan Normatif (KREN).

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 menitik beratkan pada pencapaian keseimbangan secara proporsional antara Upaya mensukseskan target indikator pembangunan daerah yang termuat dalam (1) RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 – 2023 dan RKPD 2021, (2) Ketersediaan potensi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi serta (3) Upaya pengelolaan potensi pendapatan daerah (*earning effort*), dimana ketiganya merupakan *triple-helix management* pendapatan daerah sehingga diharapkan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat memberikan sumbangsih dalam proses pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).



1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 No.82, Tambahan Lembaran Negara No. 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 junto Peraturan Gubernur NTB Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021;
 17. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 060 – 280 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 adalah untuk memenuhi amanat Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yakni sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah, dan untuk menjadi pedoman dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2021, sedangkan tujuannya adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021;
2. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
3. Terwujudnya program, kegiatan dan pagu indikatif Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.



1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 disusun sesuai dengan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas tentang Renja Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat

1.2 Landasan Hukum

Memuat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

1.3 Maksud dan tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Bappenda Provinsi NTB

1.4 Sistematika penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappenda Provinsi NTB serta susunan garis besar dokumen.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat

- Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappenda Provinsi NTB tahun lalu (tahun 2019) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2020)
- Menjelaskan pencapaian target Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun-tahun sebelumnya
- Melakukan review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Bappenda Provinsi NTB tahun lalu, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Bappenda Provinsi NTB dan /atau realisasi APBD.

2.2. Analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

- Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Bappenda Provinsi NTB berdasarkan indikator yang sudah ditentukan



- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
 - Menjelaskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappenda Provinsi NTB yang meliputi pelayanan, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan.
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
 - Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, telaahan terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
 - Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional (Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Bappenda Provinsi NTB)
 - Menjelaskan hasil penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappenda Provinsi NTB .
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Menjelaskan hasil rumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappenda Provinsi NTB yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappenda Provinsi NTB.
- 3.3. Program dan Kegiatan
 - Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV : Penutup

Berisi catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun apabila anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPENDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra)

Pelaksanaan Rencana Kerja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2020, merupakan tahun kedua pemerintahan baru dan kebijakan perencanaan yang sudah didasarkan pada Perda No. 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, dan secara garis besar program dan kegiatan yang ada telah dilaksanakan dan mencapai sasaran yang diharapkan dalam Renstra periode 2019-2023, namun ada Program dan kegiatan yang belum optimal mendukung pencapaian penerimaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang kedepannya akan di intensifkan dan dioptimalkan.

Untuk mencapai hal tersebut, sesuai dengan arah kebijakan keuangan daerah, Bappenda Provinsi NTB sesuai dengan urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
2. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan peran Unit Pelayanan Pajak Daerah se NTB dalam rangka peningkatan pelayanan dan pendapatan;
6. Meningkatkan serta memperluas jenis layanan yang berbasis Teknologi Informasi;
7. Meningkatkan serta mengoptimalkan layanan penerimaan pendapatan melalui pelayananan yang berbasis Teknologi Informasi.



Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2019 dan Tahun berjalan 2020, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program/kegiatan Renstra Bappenda Provinsi NTB. Pencapaian terhadap target Renstra serta rencana kerja yang meliputi program dan kegiatan Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 secara keseluruhan. Adapun tabel evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel dibawah.

**EVALUASI KINERJA (PROGRAM DAN KEGIATAN)
TAHUN ANGGARAN 2019 DAN PERKIRAAN REALISASI TAHUN 2020**

KODE	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2019)			Target Program/ Kegiatan Tahun Berjalan (2020)	Pagu Anggaran dan Realisasi tahun berjalan (2020)*	
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		PAGU	REALISASI
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN (PENDAPATAN)							
4.04.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	91,79	91,79	100,00	18.362.040.252	6.000.428.588
01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	9.769	9.114	93,29	9.500	130.356.500	41.838.017
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	4	4	100,00	4	3.344.622.930	1.305.008.185
01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan	83	83	100,00	83	1.183.762.000	537.521.400
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor	115	115	100,00	115	2.718.941.000	1.100.947.032
01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	652	631	96,79	684	1.187.941.381	522.507.574
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	133	97	72,79	156	1.897.509.500	340.239.086
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	10	10	96,96	12	152.805.900	57.897.400
01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	254	234	91,88	328	3.022.523.000	679.378.000
01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	144	123	85,22	158	105.270.000	26.272.000



KODE	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2019)			Target Program/ Kegiatan Tahun Berjalan (2020)	Pagu Anggaran dan Realisasi tahun berjalan (2020)*	
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		PAGU	REALISASI
01.17	Penyediaan makanan dan minuman	<i>Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman</i>	135	133	98,76	385	1.565.888.691	287.206.067
01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	<i>Jumlah unit jasa kebutuhan koordinasi antar lembaga</i>	74	74	99,37	71	523.195.000	81.331.000
01.19	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	<i>Jumlah Jasa tenaga Administrasi dan teknis perkantoran</i>	21	21	100,00	21	766.800.000	301.555.320
01.24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	<i>Jumlah jasa tenaga pengamanan kantor</i>	54	54	100,00	54	1.762.424.350	718.727.507
4.4.2.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100,00	96,14	96,14	100,00	52.677.769.001	13.470.782.837
02.03	Pembangunan gedung kantor	<i>Jumlah gedung kantor yang dibangun</i>	21	21	98,06	7	2.325.085.000	486.078.250
02.05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	<i>Jumlah unit kendaraan dinas/operasional</i>	31	30	96,55	20	887.090.000	236.000.000
02.10	Pengadaan mebeleur	<i>Jumlah paket mebeleur</i>	52	50	97,31	94	1.022.690.500	128.792.000
02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	8	8	98,60	108	896.810.100	307.199.562
02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	30	28	92,81	133	2.305.146.000	800.575.337
02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>	10	10	93,95	86	357.666.000	100.837.939
02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor</i>	10	10	99,02	67	380.106.300	107.501.936
02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	<i>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</i>	9	9	93,90	9	2.468.055.000	290.662.500
4.4.2.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Mendukung peningkatan Kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00	16,67	16,67	100,00	41.765.320.101	10.962.560.198
05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	<i>Jumlah ASN yang diikuti sertakan dalam pendidikan formal, diklat teknis substantif, diklat teknis struktural dan fungsional</i>	9	2	23,15	10	269.800.000	50.575.115



KODE	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2019)			Target Program/ Kegiatan Tahun Berjalan (2020)	Pagu Anggaran dan Realisasi tahun berjalan (2020)*	
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		PAGU	REALISASI
05.04	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	<i>Jumlah frekwensi pembinaan mental dan fisik aparatur</i>	17	16	95,94	48	231.567.000	68.065.000
05.06	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	<i>Jumlah unit/sentra layanan yang mendapat pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja birokrasi dan aparatur</i>	2	2	95,48	11	226.150.000	94.993.500
05.24	Fasilitasi Peningkatan Profesionalitas Aparat Pengendalian dan Pembinaan	<i>Jumlah/paket peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat pengendalian dan pembinaan</i>	1	1	79,85	2	115.100.000	32.450.000
4.4.2.06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun (Dok)	93,00	84,00	90,32	93,00	39.895.758.351	10.417.247.733
06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	<i>Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKjIP, LKPJ, LPPD, RKT & PK) yang disusun</i>	43	39	89,88	43	248.600.000	93.792.500
06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	<i>Jumlah dokumen Lap. keuangan akhir tahun yang disusun</i>	1	1	97,06	11	228.314.750	140.434.750
06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	<i>Jumlah penyusunan dok. perencanaan, dan Evaluasi Kinerja yg disusun</i>	47	42	89,45	47	408.190.000	65.001.600
06.17	Pengumpulan Updating dan Analysis Data Informasi Pendapatan Daerah	<i>Jumlah dokumen profil OPD yang divalidasi data dan informasi kerjanya</i>	2	1	72,58	2	141.840.000	-
4.4.2.07.	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Tertib pengelolaan aset BMN/BMD	100,00	91,50	91,50	100,00	38.217.220.101	9.978.016.883
07.01	Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah	<i>Jumlah laporan pengelolaan asset/barang milik daerah</i>	10	9	91,24	11	408.033.500	106.402.000
07.18	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	<i>Jumlah laporan hasil temuan yang ditindak lanjuti</i>	1	1	93,17	1	189.000.000	33.600.000
07.20	Fasilitasi Pengelolaan dan Penataan Arsip	<i>Jumlah dokumen pengelolaan dan penataan arsip</i>	4	3	94,19	4	54.560.000	-



KODE	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2019)			Target Program/ Kegiatan Tahun Berjalan (2020)	Pagu Anggaran dan Realisasi tahun berjalan (2020)*	
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		PAGU	REALISASI
4.04.2.28.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan Pendapatan daerah	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK (persen)	45,56	49,88	109,48	49,25	22.271.580.300	5.741.153.222
28.01	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah proyeksi penerimaan PKB dan BBNKB (Milyar rupiah)	788,69	833,94	105,74	877,55	9.542.740.000	2.894.035.712
28.02	Orientasi dan Peningkatan Teknis Kesamsatan	Jumlah Rekomendasi kesamsatan (Rekomendasi)	6	3	50,00	22	3.348.426.500	956.940.501
28.03	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah agent layanan kesamsatan yang memperoleh sertifikasi ISO (Samsat)	1	1	100,00	11	1.015.217.300	141.346.948
28.04	Akurasi Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Jumlah Proyeksi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Milyar rupiah)	254,22	268,97	105,80	290,62	518.550.000	59.311.000
28.05	Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	Jumlah Proyeksi penerimaan Pajak Air Permukaan (Milyar rupiah)	0,88	0,90	101,71	1,00	270.612.500	38.902.500
28.06	Intensifikasi Penerimaan Data Pajak Rokok	Jumlah Proyeksi penerimaan pajak rokok (Milyar rupiah)	310,00	293,93	94,82	325,50	598.500.000	6.325.000
28.07	Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	Jumlah Proyeksi Dana Perimbangan (Milyar rupiah)	3.604,32	3.342,87	92,75	3.769,55	940.800.000	264.330.100
28.08	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PPL	Jumlah Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah (Milyar rupiah)	26,33	20,93	79,50	19,64	230.488.500	26.367.900
28.09	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PPL	Laporan Rekonsiliasi dan Verifikasi data realisasi penerimaan Retribusi Daerah (Laporan)	16	14	87,50	4	506.550.000	25.740.000
28.10	Intensifikasi Obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	Proyeksi penerimaan Pendapatan lainnya (Milyar rupiah)	419,52	428,42	102,12	387,70	862.300.000	278.490.000
28.11	Pengawasan Tunggakan Penerimaan Retribusi dan PPL	Jumlah laporan hasil pengawasan tunggakan retribusi dan pendapatan lainnya (Dokumen)	2	2	100,00	4	-	-



KODE	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2019)			Target Program/ Kegiatan Tahun Berjalan (2020)	Pagu Anggaran dan Realisasi tahun berjalan (2020)*	
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		PAGU	REALISASI
28.12	Penyusunan Rancangan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi	<i>Jumlah Rancangan Regulasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang difasilitasi penyusunannya (Regulasi)</i>	7	14	200,00	7	644.707.500	211.288.840
28.13	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Kendaraan terjaring operasi penertiban kendaraan bermotor</i>	25.051	31.238	124,70	22.950	3.792.688.000	838.074.721
28.14	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<i>Pekan Sosialisasi Pajak/ Pekan Panutan Pajak (kali)</i>	1	1	100,00	12	2.092.807.500	148.328.272
28.15	Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<i>Sinkronisasi data/ tindak lanjut hasil temuan/sengketa pajak daerah dan retribusi daerah (Laporan)</i>	4	4	100,00	4	292.050.000	-
28.16	<i>Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak</i>	<i>Jumlah Surat Teguran dan penagihan pajak daerah yang disampaikan (Objek)</i>	212.389	199.175	93,78	185.000	905.312.500	314.068.993
28.17	<i>Pengawasan dan Pembinaan Internal secara berkala</i>	<i>Laporan Survei Kepuasan Pelanggan pengguna jasa kesamsatan (Dokumen)</i>	2	2	100,00	2	217.515.298	8.880.000
28.18	<i>Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor</i>	<i>Laporan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan OPGAB (Laporan)</i>	12	12	100,00	12	437.740.000	72.750.000
28.19	<i>Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah</i>	<i>Dokumen Penetapan Target Pendapatan (Dokumen)</i>	2	2	100,00	2	205.350.000	5.210.000
28.20	<i>Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	<i>Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pengembangan sistem informasi Pendapatan daerah yang tersusun (Laporan)</i>	7	6	85,71	7	322.720.000	-
28.21	<i>Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendapatan Daerah</i>	<i>Jumlah paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah yg dikembangkan</i>	3	3	100,00	8	227.450.000	-
28.22	<i>Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Pendapatan Daerah</i>	<i>Jumlah paket peningkatan kapabilitas sumber daya pengelola sistem informasi pendapatan (Paket)</i>	3	3	100,00	3	688.900.000	153.774.600

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB di dalam pelaksanaan kegiatannya, secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut didasarkan pada analisis pengukuran kinerja kegiatan dengan realisasi yang dicapai yang rata-rata mencapai 89,18%. Berdasarkan nilai capaian kegiatan tersebut, maka kinerja kegiatan dapat diartikan bahwa program dan kegiatan sebagian besar dapat dilaksanakan dan kebijakan yang ditetapkan sudah tepat. Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP pada LKjIP Bappenda Tahun 2019, berdasarkan surat Inspektorat Provinsi NTB Nomor 700/93/Itp-III/INSP/2020, tanggal 29 Mei 2020, bahwa Sistem AKIP Bappenda Provinsi NTB memperoleh nilai 80,95 dengan Kategori “A” yang menunjukkan akuntabilitas kinerja “*Excellent/memuaskan*”, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.

Hal inilah yang memberikan optimisme bagi segenap jajaran Bappenda Provinsi NTB untuk menjalankan rutinitas program dan kegiatan untuk selalu berpedoman pada tata cara dan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, guna terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*). Pada pencapaian sasaran, hal ini dapat diartikan bahwa visi “NTB Gemilang” dan misi ke- Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi, yang dicanangkan Kepala Daerah dan menjadi tanggungjawab Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan OPD pendukung lainnya dapat terealisasi.

Dari sisi pencapaian indikator kinerja utama, yaitu pada indeks kapasitas fiskal daerah, tingkat pencapaiannya mengalami peningkatan dari 0,47 dalam target Renstra dan RPJM menjadi 0,46 dalam target perubahan, serta terrealisasi sebesar 0,50 dengan capaian kinerja mencapai 109,47%.

Dari sisi pencapaian indikator kinerja utama, yaitu pada realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat pencapaiannya mengalami peningkatan sebesar 8,86 %, ada beberapa hal yang perlu diinformasikan, diantaranya adalah:

- a. Pelayanan yang belum optimal. Hal ini terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana kerja belum sepenuhnya terstandarisasi sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang menyangkut kondisi gedung dan fasilitasnya, kompetensi SDM dalam memelihara “*prinsip-prinsip customer relationship*” yang makin nyaman;



- b. Penyiapan berbagai regulasi teknis penunjang Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Intensifikasi sektor pajak dan ekstensifikasi dari sektor non pajak seperti maksimalisasi pemanfaatan asset-asset yang bernilai ekonomi serta potensi pendapatan yang timbul dari inovasi pelayanan, seperti pemanfaatan info pajak, dan kerjasama pengelolaan bersama asset di lingkungan Bappenda untuk kepentingan sektor swasta dan fasilitas penunjang aktivitas non kedinasan pegawai.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, senantiasa meningkatkan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat pengguna. Adapun peningkatan pelayanan tersebut dilaksanakan dengan berbagai cara, diantaranya adalah:

1. Peningkatan standarisasi fasilitas sarana dan prasarana pada UPTB-UPPD Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di kota/kabupaten;
2. Peningkatan fasilitas pelayanan khusus melalui pelayanan drive thru, pelayanan samsat pasar (*outlet*), samsat desa, samsat keliling, Samsat Kartono, Samsat Ladies, Samsat Lilin Madu, Samsat OnCall, e-Samsat dan Samsat Delivery yang berada di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat pengguna;
3. Pengembangan sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi;
4. Perintisan *banking system* dalam penerimaan pendapatan daerah di sektor pajak;
5. Mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis transaksi elektronik (e-Samsat); dan
6. Mendorong kesadaran taat bayar pajak khususnya ASN Bappenda pada tahap awal, dan selanjutnya OPD Pemprov NTB, serta masyarakat yang berdomosili di wilayah Nusa Tenggara Barat melalui fasilitas Auto Debet tebungan Bank NTB (t - Samsat).

Pelaksanaan program kegiatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 sebagian besar dapat memenuhi target output pada tahun berkenaan. Jika dikaitkan dengan pencapaian indikator pencapaian Renstra, kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Target Murni / Tahun					Realisasi 2019	Capaian
						2019	2020	2021	2022	2023		
	Penguatan Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah,	Meningkatnya kemandirian Keuangan Daerah	1	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (Nilai)	0,47	0,49	0,52	0,54	0,57	0,50	106,38
				2	Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah (Milyar rupiah)	5.244,78	5.555,22	6.065,03	6.483,20	7.020,00	5.197,73	99,10
1	Meningkatkan penerimaan daerah yang makin optimal	Tingkat Pertumbuhan pendapatan daerah (%)	Tercapainya Peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah	3	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (%)	- 4,84	12,38	20,14	11,26	13,34	8,89	-183,77
				4	Jumlah Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah (Milyar rupiah)	1.340,69	1.531,91	1.862,13	2.101,52	2.416,11	1.404,85	104,79
				5	Rasio Wajib Pajak (WP) yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya (%)	49,64	49,85	49,97	51,34	52,24	50,04	100,81
				6	Data potensi Wajib Pajak (WP) yang divalidasi (Ribu obyek)	1.752,2	1.847,2	1.942,2	2.039,2	2.132,2	1.780,97	101,64
2	Meningkatkan potensi penerimaan Retribusi daerah dan Pendapatan Lainnya	Proporsi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan dan peningkatan sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah	7	Potensi penerimaan retribusi daerah yang terpungut (%)	90,00	90,00	95,00	95,00	100,00	77,44	86,05
				8	Persentase Perangkat Daerah Penghasil yang melaksanakan Rekon-siliasi data retribusinya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				9	Jumlah Proyeksi Pene-riimaan Pendapatan diluar Pajak Daerah (Milyar rupiah)	428,77	415,26	466,18	482,87	505,90	403,25	94,05
3	Mewujudkan kepuasan pelayanan publik yang makin berkualitas	Rerata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	10	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	83,50	85,00	85,00	87,50	90,00	81,26	97,32
				11	Persentase penurunan WP berkategori TMDU (Tidak Melakukan Daftar Ulang) kendaraan bermotornya (%)	50,36	50,15	50,03	48,66	47,76	49,96	99,21



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Target Murni / Tahun					Realisasi 2019	Capaian
						2019	2020	2021	2022	2023		
4	Memantapkan Kinerja Organisasi dalam menopang pengelolaan pendapatan daerah	Nilai Dokumen Kinerja	Menigkatnya kualitas Perencanaan, Sistem Akuntabilitas kinerja dan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah berbasis Teknologi Informasi	12	Skor penilaian evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Instansi penilai (Nilai)	70,00	72,50	75,00	80,00	82,50	81,36	116,23
				13	Tingkat keandalan sistem jaringan dan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi (%)	98,24	98,50	98,74	98,89	99,04	98,42	100,18
5	Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan kualitas kinerja kelembagaan yang makin berdaya saing	Tingkat penyerapan anggaran (%)	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan dukungan manajemen ketatalaksanaan dalam menopang operasional kantor dan kinerja aparatur	14	Rasio cakupan sentra layanan PKB dan BBNKB terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja - (Skala)	1:110	1:110	1:115	1:115	1:120	1 : 119	105,29
				15	Persentase Aparatur yang mengikuti Pendi-dikan teknis Substantif dan sertifikasi kompetensi profesi (%)	35	35	40	45	45	22	62,86

Pada tahun berjalan (2020) program yang dilaksanakan sejumlah 6 Program dan 54 kegiatan, dengan perkiraan capaian kinerja sebesar 94,75%, dengan rincian sebagai berikut: (1).Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah perkiraan rasio capaiannya 92,00%; (2). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran perkiraan rasio 97,50%; (3). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87,50%; (4). Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan rasio capaiannya 90,00%; (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, perkiraan rasio 92,50% dan yang terakhir adalah (6) Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rasio capaian 85,00%.

Berikut diuraikan tentang Realisasi Capaian Renstra Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat (dengan Indikator Kinerja Utama sesuai Tugas dan Fungsi) sampai dengan Triwulan II Tahun 2020. Rincian proyeksi Capaian Indikator Kinerja Utama Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dan Triwulan II Tahun 2020

No	Indikator	Satuan	Transisi	Target Capaian Kinerja Tahun (ke-n)					Realisasi			Rasio Pertumbuhan		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020 *)	2018	2019	2020 *)
1	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	0,45	0,47	0,48	0,50	0,52	0,54	0,47	0,50	0,44	3,61	6,47	-8,39
2	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	Persen	33,07	32,07	33,25	35,20	36,76	38,44	33,60	34,77	30,97	1,63	8,42	-6,87
3	Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah	Milyar Rp	5.346	5.245	5.049	5.549	5.797	6.074	4.941	5.198	2.656	-7,57	-0,90	-47,39
4	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	Persen	45,42	46,84	48,41	50,12	52,03	54,03	47,06	49,88	-53,47	3,61	6,47	-210,44

Keterangan: *) Sementara s/d Juni 2020; Sumber : Bappenda Provinsi NTB (data diolah)

Dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, ditetapkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) sebagai indikator Benefit (IKD) Kepala Daerah sebagai sasaran dari Penguatan Fiskal Daerah dengan Misi kedua “NTB Bersih dan Melayani”, sehingga dalam Renstra Bappenda Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sasaran tersebut menjadi tujuan Bappenda dengan Indikator IKFD dan Proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah. Dalam perjalanannya dilakukan revisi Renstra sebagai penyesuaian atas revisi RPJMD yang menyesuaikan diri dengan RPJM Nasional yang diterbitkan belakangan.

Dibawah ini diuraikan dasar pertimbangan dilakukan revisi atas RPJMD dan Renstra OPD adalah sebagai berikut:

- ❑ Adanya perubahan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang PerPres No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
- ❑ Adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- ❑ Adanya beberapa koreksi dan catatan dari hasil review KemenPAN RB sebagaimana telah dituangkan kedalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Program Strategis dan Unggulan Daerah Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;



- ❑ Penyesuaian terhadap isu strategis tentang Covid-19 yang berdampak langsung pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Provinsi NTB dan upaya pemulihannya;
- ❑ Hasil evaluasi terhadap progres capaian pembangunan di NTB yang memerlukan peninjauan kembali baik indikator program, indikator kinerja, strategi, kebijakan dan program prioritas dalam upaya mendukung percepatan keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023;
- ❑ Adanya pergeseran Misi yang harus diusung Bappenda, sebagai tindak lanjut rekomendasi KemenPAN RB dari Misi kedua menjadi Misi kelima;
- ❑ Pada Misi kelima Fokus Bappenda lebih dititik beratkan pada aspek Pendapatan, sementara pada misi kedua pada aspek pelayanan;
- ❑ Perlu penyederhanaan dalam Tujuan OPD, demikian pula Sasaran lebih difokuskan pada dua aspek besar yakni peningkatan Pendapatan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam tabel 2.4 diatas, diuraikan Indikator Kinerja Benefit yang menjadi tanggung jawab Bappenda dalam periode 2019-2023, yang dalam Renstra sebelum revisi menunjukkan target IKFD berkategori “sedang” diproyeksikan akan dicapai dalam tahun 2022, sementara dalam revisi Renstra target IKFD “sedang” akan dicapai dalam tahun 2023. Hal ini dipicu oleh target pendapatan fluktuatif hingga revisi ke lima, karena diawal tahun 2020 dunia mulai dilanda pandemik Covid-19 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di tanah air mulai melamban, neraca perdagangan turun drastis, sektor jasa transportasi dan pariwisata mulai terpuruk dengan banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan, gelombang PHK terjadi dimana-mana dan berujung pada resesi. Semua faktor diatas berdampak pula pada pencapaian target pendapatan daerah yang harus menyesuaikan diri dengan faktor eksternal.

Rasio pertumbuhan IKFD tahun 2019 tercapai 6,47%; Proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah bertumbuh negatif 0,90%; Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD sebagai indikator dari sasaran Meningkatnya PAD di tahun 2019 bertumbuh 8,42%; Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK) bertumbuh 6,47%, sementara sampai triwulan II Tahun 2020 keempat indikator tadi masih bertumbuh negatif.



Tabel 2.5 Perbandingan Realisasi Pendapatan dengan Target Pendapatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 (dalam juta rupiah)

No.	Kelompok Dan JenisPendapatan	2018			2019			2020 *)			Proyeksi 2021
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
	Total Pendapatan	5.346.185	4.931.139	92,42	5.403.970	5.197.554	96,18	5.671.543	3.330.932	58,73	5.549.139
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.767.746	1.660.300	93,92	1.708.660	1.807.309	105,77	1.844.847	1.130.973	61,30	1.953.195
a.	Pajak Daerah	1.293.238	1.269.689	98,18	1.353.790	1.404.965	103,78	1.494.660	846.789	56,65	1.487.727
	Pajak Kendaraan Bermotor	362.500	389.092	107,34	407.690	437.163	107,23	460.370	274.590	59,65	473.050
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	350.936	357.905	101,99	381.000	404.010	106,04	417.175	190.995	45,78	385.769
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	225.593	230.105	102	254.220	268.968	105,80	290.615	164.984	56,77	249.900
	Pajak Air Permukaan	1.100	931	84,63	880	896	101,88	1.000	831	83,11	1.320
	Pajak Rokok	353.110	291.655	82,6	310.000	293.927	94,82	325.500	215.390	66,17	377.688
b.	Retribusi Daerah	59.487	21.300	35,4	26.332	21.579	81,95	19.639	11.056	56,29	47.220
	Retribusi Jasa Umum	9.269	8.621	92,99	10.008	7.599	75,93	2.209	1.102	49,88	10.501
	Retribusi Jasa Usaha	48.175	10.850	22,03	13.658	12.305	90,09	14.460	9.305	64,35	34.759
	Retribusi Perijinan Tertentu	2.042	1.825	89,39	2.666	1.675	62,83	2.971	649	21,84	1.959
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	62.302	60.080	96,43	54.589	54.173	99,24	54.380	49.561	91,14	61.156
d.	Lain-lain PAD Yang Sah	352.719	309.230	88,06	273.950	326.591	119,22	276.168	223.566	80,95	357.092
II	DANA TRANSFER										3.540.017
1	Dana Perimbangan	3.317.993	3.202.016	96,5	3.604.325	3.342.866	92,75	3.769.547	2.160.824	57,32	3.499.220
a.	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	325.953	261.643	80,27	366.759	185.325	50,53	271.134	170.734	62,97	347.712
b.	Dana Alokasi Umum	1.537.778	1.537.778	100	1.583.746	1.583.746	100,00	1.599.584	1.125.203	70,34	1.499.373
c.	Dana Alokasi Khusus	1.454.262	1.412.967	97,16	1.653.820	1.573.795	95,16	1.898.829	864.887	45,55	1.652.134
	Dana Insentif Daerah (DID)										39.135
2	Bantuan Keuangan										1.662
III	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	260.446	68.442	26,28	90.985	47.379	52,07	57.150	39.135	68,48	55.927

Keterangan: *) sampai dgn Triwulan II Tahun 2020



Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan antara target dan realisasi dalam 2 (dua) tahun terakhir yakni 2018 dan 2019. Pada tahun 2018 target Pendapatan Daerah Provinsi NTB sebesar Rp. 5,35 triliun sementara raealisasi penerimaan berjumlah Rp. 4,93 triliun atau 92,42%, pada tahun 2019 target Pendapatan Daerah Provinsi NTB sejumlah Rp.5,40 triliun sedangkan realisasinya sebesar Rp.5,20 triliun atau 96,18%. Sementara tahun berjalan 2020 target pendapatan daerah sebesar Rp.5,67 triliun sedangkan realisasi sebesar Rp.3,33 triliun atau 58,73%, sementara untuk tahun 2021 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 5,55 triliun.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak terlepas dari hal-hal utama yang terkait dengan pelayanan Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, koordinasi dan sinergi program antar OPD penghasil di Kabupaten/Kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan menjadi hal yang perlu dikaji sehingga permasalahan dan hambatan yang dapat ditanggulangi sedini mungkin.

Dengan diketahuinya hal-hal tersebut, maka dapat pula diketahui tantangan dan peluang yang dapat dijadikan suatu tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna. Berdasarkan hal tersebut, dapat dibuat rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas.

Apabila kita komparasikan dengan OPD Kabupaten/Kota, ada perbedaan dan persamaan yang dimiliki oleh Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan OPD penghasil di Kabupaten/Kota. Perbedaannya dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing OPD penghasil, sehingga sasaran dari kegiatan yang hendak dicapai berbeda. Selain itu kewenangan dalam memungut pajak pun berbeda, sehingga objek pajaknya pun menjadi berbeda.

Persamaan yang dimiliki oleh Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan OPD penghasil di Kabupaten/Kota dan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dapat dilihat dari indikator kinerja dan sasaran yang hendak dicapai. Persamaan tersebut antara lain adalah:

1. Meningkatkan pendapatan daerah/negara;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan;
3. Meningkatkan kualitas aparatur;
4. Menciptakan *networking* dan koordinasi yang sinergi.



Untuk pemasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penegasan disiplin kinerja perlu diperkuat;
2. Ketiadaan *prototype* standar sarana prasarana kesamsatan mendorong adanya perbedaan kondisi layanan;
3. Kuantitas dan kualifikasi SDM *legal drafter* belum memadai;
4. Akurasi penyusunan asumsi dan perhitungan target masih harus ditingkatkan;
5. Belum ada sertifikasi kompetensi untuk pegawai Bappenda;
6. Model *Smart Planning* belum konsisten diterapkan sehingga berdampak pada akurasi penyusunan LKjIP;
7. Metode penerapan SPI perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan;
8. Belum ada ukuran penetapan belanja operasional per pendapatan sebagai hasil kinerja operasional terhadap kebutuhan belanja unit penghasil sehingga standarisasi sarana prasarana tidak terjamin, terutama terkait waktu penuntasannya secara keseluruhan;
9. Instrumen pengukuran kinerja perlu terus diperbaiki dlm metodenya;
10. Belum tersedianya instrumen persepsi mal adminisitrasi/ KKN.

Dari hal-hal tersebut, maka rekomendasi dan dan catatan strategis yang dapat diambil dalam perumusan program dan kegiatan prioritas adalah sebagai berikut :

1. Terus meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia pengelola pendapatan yang makin bersaing dengan kelembagaan keuangan baik sektor pemerintahan lainnya maupun dengan sektor swasta;
2. Melanjutkan standarisasi penyediaan sarana penunjang pelayanan yang makin proporsional dengan beban layanannya;
3. Mempertajam kalkulasi dan pemilihan asumsi-asumsi yang memperkuat kuantitas dan kualitas target pendapatan daerah;
4. Melanjutkan upaya-upaya penguatan peran dan fungsi selaku unit pengelola dan koordinator pendapatan daerah yang makin akuntabel;
5. Terus mengupayakan otomatisasi pelayanan pendapatan yang makin memiliki keterkaitan dengan sistem perbankan yang menjadi mitra kas daerah;
6. Terus mengupayakan mempertajam kalkulasi untuk memperkuat kualitas penetapan kebutuhan belanja;
7. Terus berupaya untuk meningkatkan ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dengan adanya prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan berdasarkan kondisi, fenomena, isu strategis yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Menetapkan program prioritas pembangunan (*Common Goals*) dan kegiatan tematik untuk mensinergikan pembangunan yang bermutu dan akuntabel.

Apabila kita bandingkan dengan rancangan awal RKPD tahun 2021, maka program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat utamanya dalam rangka mendukung pelaksanaan agenda prioritas daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sebelumnya mendukung pelaksanaan misi kedua yaitu NTB Bersih dan Melayani, maka di tahun 2021 bergeser pada Misi kelima NTB Sejahtera dan Mandiri. Untuk dapat mendukung pencapaian misi Gubernur Nusa Tenggara Barat tersebut, maka diperlukan sinkronisasi agenda prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan agenda prioritas yang direncanakan oleh Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hal-hal yang digariskan dalam rancangan awal RKPD Tahun 2021, penyusunan program/pembangunan diarahkan kepada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan sasaran programnya yaitu Terwujudnya Peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah.

Selain itu, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, disamping menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, memperhatikan kemampuan anggaran yang tersedia, juga melakukan upaya-upaya kemitraan dengan perbankan dan pihak lainnya yang berpotensi dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan serta penguatan pelayanan Bappenda, sehingga tercipta keselarasan dan sinergi dalam pencapaian sasaran Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021.

Untuk diketahui, pada tahun 2021 nanti postur perencanaan anggaran tidak lagi disusun berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 tetapi merujuk pada Permendagri 90 Tahun 2019 yang mengadopsi sistem perencanaan mulai dari program, kegiatan sampai sub kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.



Tabel 2.6

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISYS KEBUTUHAN			
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prov.NTB	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	Persen	35,20	103.795,85	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	35,20	103.795,85
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov.NTB	Nilai Sistem AKIP OPD	Nilai	A	88.321,89	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sistem AKIP OPD	A	88.321,89
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov.NTB	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	Persen	100,00	546,81	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100,00	546,81
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mataram	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	Dokumen	2	97,72	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	2	97,72
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov.NTB	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Dokumen	11	69,40	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	11	69,40
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prov.NTB	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP)	Dokumen	11	68,39	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP)	11	68,39
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prov.NTB	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Dokumen	11	28,74	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	11	28,74
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Prov.NTB	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	Dokumen	11	29,70	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	11	29,70
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mataram	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	Dokumen	39	104,29	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	39	104,29
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mataram	Jumlah dokumen Laporan Tahunan; Profil Kinerja Bappenda	Dokumen	10	148,58	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Tahunan; Profil Kinerja Bappenda	10	148,58



RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISYS KEBUTUHAN			
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov.NTB	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	Persen	> 90	56.799,35	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	> 90	56.799,35
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mataram	Jumlah ASN, Non ASN, dan KDH/WKDH	Orang	450	56.052,64	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN, Non ASN, dan KDH/WKDH	450	56.052,64
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov.NTB	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi	Dokumen	20.000	454,26	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi	20.000	454,26
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mataram	Jumlah Dok. Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	11	73,56	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dok. Laporan Keuangan Akhir Tahun	11	73,56
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Mataram	Jumlah laporan hasil temuan yang tindak lanjuti	Dokumen	2	63,48	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan hasil temuan yang tindak lanjuti	2	63,48
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Mataram	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Keuangan berkala	Dokumen	18	36,94	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Keuangan berkala	18	36,94
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Mataram	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Dokumen	4	118,47	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	4	118,47
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prov.NTB	Persentase BMD yang tertib administrasi	Persen	85,00	86,38	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang tertib administrasi	85,00	86,38
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Prov.NTB	Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Dokumen	2	32,88	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	2	32,88
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov.NTB	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	22	50,05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	22	50,05
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mataram	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	3,45	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	3,45



RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISYS KEBUTUHAN			
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prov.NTB	Proporsi penerimaan pendapatan Bukan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	23,83	661,68	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Proporsi penerimaan pendapatan Bukan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	23,83	661,68
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Mataram	Jumlah Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah	Milyar rupiah	17,04	368,26	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah	17,04	368,26
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Mataram	Jumlah Paket pengembangan Aplikasi Pendapatan Retribusi	Paket	2	189,72	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Paket pengembangan Aplikasi Pendapatan Retribusi	2	189,72
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Mataram	Laporan Rekapitulasi dan Hasil Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	4	103,70	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Rekapitulasi dan Hasil Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah	4	103,70
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prov.NTB	Persenatse aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	12,50	530,64	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persenatse aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	12,50	530,64
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Prov.NTB	Jumlah kali pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga	Kali	75	272,43	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah kali pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga	75	272,43
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mataram	Jumlah Dokumen Data pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	103,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Data pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1	103,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mataram	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	53,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	53,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mataram	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal, diklat teknis substantif, diklat teknis struktural dan fungsional	Orang	15	50,11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal, diklat teknis substantif, diklat teknis struktural dan fungsional	15	50,11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mataram	Jumlah Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pendapatan Daerah	Paket	2	52,09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pendapatan Daerah	2	52,09



RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISYS KEBUTUHAN			
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prov.NTB	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	Persen	100,00	7.701,47	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	100,00	7.701,47
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov.NTB	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jenis	258	199,17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	258	199,17
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov.NTB	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	298	292,58	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	298	292,58
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mataram	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket	65	4,65	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	65	4,65
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov.NTB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	75	1.638,14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	75	1.638,14
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov.NTB	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	131	1.491,08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	131	1.491,08
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prov.NTB	Jumlah Bahan Bacaan	Jenis	45	102,36	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	45	102,36
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov.NTB	Jumlah Tamu yang difasilitasi	Tahun	1	997,11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	1	997,11
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov.NTB	Jumlah Kali Penyelenggaraan Rapat	Kali	12	1.869,65	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Penyelenggaraan Rapat	12	1.869,65
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prov.NTB	Jumlah bahan dan alat pendukung penataan arsip	Berkas	16.000	130,66	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bahan dan alat pendukung penataan arsip	16.000	130,66
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Mataram	Jumlah Kunjungan website resmi Bappenda	Paket	65.000	976,07	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kunjungan website resmi Bappenda	65.000	976,07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prov.NTB	Persentase pemenuhan BMD Penunjang	Persen	100,00	6.426,84	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100,00	6.426,84
Pengadaan Mebel	Prov.NTB	Jumlah Mebel	Buah/Set	32	226,03	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	32	226,03
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov.NTB	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Unit/Paket	17	474,13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	17	474,13



RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISYS KEBUTUHAN			
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Mataram	Jumlah aset tak berwujud	Paket	8	107,52	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud	8	107,52
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov.NTB	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	1	5.619,16	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya	1	5.619,16
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov.NTB	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	Persen	100,00	12.164,66	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100,00	12.164,66
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov.NTB	Jumlah Surat yang diadministrasikan	Surat	11.038	162,09	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan	11.038	162,09
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov.NTB	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis	4	3.727,68	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4	3.727,68
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov.NTB	Jumlah tenaga administrasi keuangan	Orang	99	8.274,89	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan	99	8.274,89
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov.NTB	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	Persen	100,00	3.404,05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100,00	3.404,05
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mataram	Jumlah kendaraan jabatan yang di pelihara dan dibayar PKBnya	Unit	1	25,17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang di pelihara dan dibayar PKBnya	1	25,17
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov.NTB	Jumlah kendaraan operasional yang di pelihara dan dibayar PKBnya	Unit	38	1.746,17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang di pelihara dan dibayar PKBnya	38	1.746,17
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov.NTB	Jumlah peralatan dan mesin	Unit	250	641,62	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	250	641,62
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Prov.NTB	Jumlah paket aset tak berwujud	Paket	22	125,84	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah paket aset tak berwujud	22	125,84
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prov.NTB	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan yang dipelihara atau direhab	Unit	134	865,25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan yang dipelihara atau direhab	134	865,25



RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISYS KEBUTUHAN			
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Prov.NTB	Derajat Desentralisasi (Persen)	Persen	35,20	527,52	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Derajat Desentralisasi (Persen)	35,20	527,52
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Prov.NTB	Pertumbuhan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	Persen	6,76	154,62	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6,76	154,62
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Mataram	Jumlah Dokumen Target Pendapatan Daerah (Dokumen)	Dokumen	2	154,62	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Target Pendapatan Daerah (Dokumen)	2	154,62
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prov.NTB	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	Persen	63,79	372,90	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	63,79	372,90
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Mataram	Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan	Milyar Rp	3.499,22	372,90	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan	3.499,22	372,90
		Jumlah Penerimaan dana Transfer Lainnya	Milyar Rp	40,80			Jumlah Penerimaan dana Transfer Lainnya	40,80	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prov.NTB	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	Persen	50,12	14.946,44	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50,12	14.946,44
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prov.NTB	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Persen	6,76	14.946,44	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	6,76	14.946,44
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Mataram	Jumlah target pajak daerah yang ditetapkan	Milyar Rupiah	1.487,73	707,14	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah target pajak daerah yang ditetapkan	1.487,73	707,14
		Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Milyar Rupiah	473,05			Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	473,05	
		Target Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Milyar Rupiah	385,77			Target Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	385,77	
		Target Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Milyar Rupiah	249,90			Target Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	249,90	



RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISYS KEBUTUHAN			
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Mataram	Target Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP)	Milyar Rupiah	1,32	2.071,78	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Target Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP)	1,32	2.071,78
		Target Penerimaan Pajak Rokok	Milyar Rupiah	377,69			Target Penerimaan Pajak Rokok	377,69	
		Jumlah Dokumen Kajian Pajak	Dokumen	5			Jumlah Dokumen Kajian Pajak	5	
		Jumlah Rekomendasi kesamsatan	Rekomendasi	2			Jumlah Rekomendasi kesamsatan	2	
		Jumlah dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) pelayanan pajak daerah	MoU	5			Jumlah dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) pelayanan pajak daerah	5	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Prov.NTB	Jumlah layanan kesamsatan yang memperoleh sertifikasi ISO	Unit	1	1.241,14	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah layanan kesamsatan yang memperoleh sertifikasi ISO	1	1.241,14
		Jumlah fasilitasi Rancangan Regulasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya	Regulasi	13			Jumlah fasilitasi Rancangan Regulasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya	13	
		Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah serta Pekan Pajak dan Gebyar Pajak	Kali	150			Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah serta Pekan Pajak dan Gebyar Pajak	150	
		Jumlah paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah yang diadakan	Paket	12			Jumlah paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah yang diadakan	12	
		Jumlah Potensi Obyek: (1) Kendaraan Baru	Obyek	122.583			Jumlah Potensi Obyek: (1) Kendaraan Baru	122.583	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Prov.NTB	(2) Mutasi Masuk Luar Provinsi	Obyek	9.384	1.558,40	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	(2) Mutasi Masuk Luar Provinsi	9.384	1.558,40
		(3) Jumlah Potensi Aktif	Obyek	703.878			(3) Jumlah Potensi Aktif	703.878	



RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISYS KEBUTUHAN			
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
		(4) Jumlah Potensi Tidak Melakukan Daftar Ulang (TMDU)	Obyek	105.071			(4) Jumlah Potensi Tidak Melakukan Daftar Ulang (TMDU)	105.071	
		Jumlah Subyek PAP yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan Air Permukaan	Obyek	10			Jumlah Subyek PAP yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan Air Permukaan	10	
		Jumlah Dokumen data potensi pajak (PBBKB, PAP dan Pajak Rokok)	Dokumen	3			Jumlah Dokumen data potensi pajak (PBBKB, PAP dan Pajak Rokok)	3	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Mataram	Jumlah Record yang diolah dan disimpan dalam Database	Obyek	1.600.000	251,40	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Record yang diolah dan disimpan dalam Database	1.600.000	251,40
		Jumlah piranti lunak Sistem Informasi Pendapatan yang dikelola	Aplikasi	22			Jumlah piranti lunak Sistem Informasi Pendapatan yang dikelola	22	
		Jumlah paket perangkat keras yang dikelola dan dikembangkan	Paket	5			Jumlah paket perangkat keras yang dikelola dan dikembangkan	5	
		Jumlah paket peningkatan kapabilitas sumber daya pengelola sistem informasi pendapatan	Paket	3			Jumlah paket peningkatan kapabilitas sumber daya pengelola sistem informasi pendapatan	3	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Prov.NTB	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor	Obyek	835.844	1.536,84	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor	835.844	1.536,84
		Jumlah Subyek pajak Yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak Air Permukaan	Subyek	5			Jumlah Subyek pajak Yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak Air Permukaan	5	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Prov.NTB	Jumlah Wajib Pajak yang Diedukasi	Orang	50.000	616,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang Diedukasi	50.000	616,00



RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISYS KEBUTUHAN			
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Mataram	Jumlah dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	5	217,40	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	5	217,40
Penagihan Pajak Daerah	Prov.NTB	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SP2T) dan Surat Teguran Pajak dan Penagihan Pajak Daerah, Surat Teguran PKB	Obyek	487.697	2.019,99	Penagihan Pajak Daerah	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SP2T) dan Surat Teguran Pajak dan Penagihan Pajak Daerah, Surat Teguran PKB	487.697	2.019,99
		Surat tagihan Pajak daerah (PAP); Surat Ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) PBBKB	Obyek	35			Surat tagihan Pajak daerah (PAP); Surat Ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) PBBKB	35	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Mataram	Jumlah kasus keberatan pajak daerah yang ditindak lanjuti	Kasus	3	146,62	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah kasus keberatan pajak daerah yang ditindak lanjuti	3	146,62
		Jumlah Sinkronisasi data/ tindak lanjut hasil temuan/ sengketa pajak daerah dan retribusi daerah (Dok)	Dokumen	4			Jumlah Sinkronisasi data/ tindak lanjut hasil temuan/ sengketa pajak daerah dan retribusi daerah (Dok)	4	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Prov.NTB	Jumlah Sentra Layanan Kesamsatan yang Nilai persepsinya sangat baik	Samsat	4	3.203,22	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Sentra Layanan Kesamsatan yang Nilai persepsinya sangat baik	4	3.203,22
		Laporan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Operasi Sadar Pajak Kendaraan Bermotor	Dokumen	12			Laporan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Operasi Sadar Pajak Kendaraan Bermotor	12	
		Jumlah Kendaraan Bermotor yang terjaring Operasi Sadar Pajak Kendaraan Bermotor	Obyek	27.169			Jumlah Kendaraan Bermotor yang terjaring Operasi Sadar Pajak Kendaraan Bermotor	27.169	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tunggakan Pajak, Retribusi dan PLL	Dokumen	4			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tunggakan Pajak, Retribusi dan PLL	4	



RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISYS KEBUTUHAN			
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
		Menurunnya Jumlah Notice Pajak Yang dibatalkan/kesalahan	Lembar	2.500			Menurunnya Jumlah Notice Pajak Yang dibatalkan/kesalahan	2.500	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Mataram	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	425,71	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	425,71
		Dokumen Hasil Rakor Retribusi dan Pendapatan Lain-lain	Dokumen	1			Dokumen Hasil Rakor Retribusi dan Pendapatan Lain-lain	1	
		Jumlah Penyuluhan dan Sosialisasi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain	kali	1			Jumlah Penyuluhan dan Sosialisasi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain	1	
		Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Data Retribusi dan Pendapatan Lain-lain	Dokumen	4			Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Data Retribusi dan Pendapatan Lain-lain	4	
		Dokumen Hasil Evaluasi Pengelolaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain	Dokumen	2			Dokumen Hasil Evaluasi Pengelolaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain	2	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rencana kerja Bappenda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021, tidak langsung mengampu atau mengakomodir program kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan instansi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, toga toma, maupun perguruan tinggi. Usulan-usulan yang ditampung menjadi bagian dari perencanaan melalui mekanisme musrenbang, sedang pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di organisasi Bappenda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sementara proses perencanaan lebih diarahkan pada penampungan kebutuhan seluruh UPTB-UPPD/Samsat dan mitra kerjanya yang tersebar di 10 (sepuluh) Kab/Kota se-NTB, sedangkan pada proses *top downnya* bersumber dari pemaknaan kebijakan nasional, komitmen Kepala Daerah serta analisis situasi yang dipandang perlu oleh pimpinan beserta jajaran Bappenda Provinsi NTB.



Hal yang menjadi perhatian dalam rencana kerja adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seoptimal mungkin dengan mengedepankan basis teknologi berkualitas layanan perbankan (*Fintech*), sehingga tercipta kenyamanan. Untuk menunjang kenyamanan diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, peningkatan sumberdaya yang makin terstandarisasi. Di Tahun 2021 Bappenda Provinsi NTB berencana akan menyelesaikan gedung penyimpanan sementara. Rencana relokasi UPTB Selong yang semula di jalan Dewi Sartika, Rakam – Selong, sudah dipindahkan ke Jl. Prof. Moh. Yamin, Selong. Demikian juga dengan pembangunan gedung Dirlantas, yang telah selesai dan diresmikan diawal tahun 2020.





BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan pusat dan daerah, baik lima tahunan maupun tahunan akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkat pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan antar sektor, antar waktu, antar wilayah, dan antara pusat dan daerah. Selain itu, Musrenbang juga diharapkan dapat lebih mendorong terciptanya proses partisipatif semua pelaku pembangunan dan berkembangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan di Nusa Tenggara Barat tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi semata, akan tetapi perlu dukungan dari stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021. Bappenda Provinsi NTB dalam menentukan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan visi NTB Gemilang, dan mendukung kebijakan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Kerja ini telah mengacu kepada review Renstra Bappenda Provinsi NTB tahun 2019–2023, yang disesuaikan dengan perkiraan-perkiraan kondisi, trend dan asumsi potensi pendapatan di Tahun 2020 serta arahan pembangunan daerah yang ada pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023. Adapun tujuan yang ditetapkan Bappenda yakni “Terwujudnya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang makin transparan dan akuntabel” dengan sasaran: (1) Meningkatnya peran PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah; dan (2) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana program dan kegiatan pada tahun 2021, akan dilaksanakan Bappenda Provinsi NTB dan 10 Unit UPTB UPPD yang tersebar di seluruh Nusa Tenggara Barat. Adapun rumusan program dan kegiatan tersebut telah di sinkronkan dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan tahun 2021 merupakan tahun awal pelaksanaan migrasi sistem pengelolaan keuangan daerah dari sistem berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 menjadi platform berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, dengan nomenklatur yang serba mengikat antara tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pemerintahan daerah dalam manajemen pemerintahan.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 3 (tiga) program, 7 (tujuh) Kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 191.326.550.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel T-C.4.

Rancangan Awal Renja Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.02	KEUANGAN	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Indeks	Prov. NTB	0,50	103.795.850.708,00	APBD	Lanjutan	0,52	110.324.443.176,00
03.00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	Persen	Prov. NTB	35,20	103.795.850.708,00	APBD	Lanjutan	36,76	110.324.443.176,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sistem AKIP OPD	Nilai	Prov. NTB	A (82,50)	88.321.886.308,00	APBD	Baru	A (83,50)	95.188.476.276,00
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	Persen	Prov. NTB	100,00	546.814.100,00	APBD	Baru	100,00	546.814.100,00
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	Dokumen	Mataram	2	97.715.600,00	APBD	Baru	2	97.715.600,00
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Dokumen	Prov.NTB	11	69.403.300,00	APBD	Baru	11	69.403.300,00
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP)	Dokumen	Prov.NTB	11	68.392.500,00	APBD	Baru	11	70.092.500,00
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Dokumen	Prov.NTB	11	28.735.900,00	APBD	Baru	11	28.735.900,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	Dokumen	Prov.NTB	11	29.698.600,00	APBD	Baru	11	29.698.600,00
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Dokumen	Mataram	39	104.287.400,00	APBD	Baru	39	104.287.400,00
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Tahunan; Profil Kinerja Bappenda	Dokumen	Mataram	10	148.580.800,00	APBD	Baru	10	146.880.800,00
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	Persen	Prov.NTB	> 90	56.799.354.143,00	APBD	Baru	> 90	67.069.588.798,00
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN, Non ASN, dan KDH/WKDH	Orang	Mataram	350	56.052.642.043,00	APBD	Baru	350	66.322.876.698,00
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi	Dokumen	Prov.NTB	20.000	454.257.500,00	APBD	Baru	20.000	456.225.500,00
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dok. Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	Mataram	11	73.564.600,00	APBD	Baru	11	71.596.600,00
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan hasil temuan yang ditindak lanjuti	Dokumen	Mataram	2	63.480.000,00	APBD	Baru	2	63.480.000,00
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Keuangan berkala	Dokumen	Mataram	18	36.940.000,00	APBD	Baru	18	36.940.000,00
5.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Dokumen	Mataram	12	118.470.000,00	APBD	Baru	12	118.470.000,00
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang tertib administrasi	Persen	Prov.NTB	85,00	86.376.700,00	APBD	Baru	85,00	86.376.700,00
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Dokumen	Prov.NTB	22	32.878.600,00	APBD	Baru	22	32.878.600,00
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	Prov.NTB	22	50.046.000,00	APBD	Baru	22	50.046.000,00
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen	Mataram	1	3.452.100,00	APBD	Baru	1	3.452.100,00
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Proporsi penerimaan pendapatan Bukan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	Prov.NTB	23,83	661.681.800,00	APBD	Baru	22,50	661.681.800,00
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah	Milyar Rp.	Mataram	47,22	368.260.000,00	APBD	Baru	18,33	368.260.000,00
		Dokumen Hasil Rakor Retribusi dan Pendapatan Lain-lain	Dokumen	Mataram	1					



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Paket pengembangan Aplikasi Pendapatan Retribusi	Paket	Mataram	2	189.721.800,00	APBD	Baru	2	189.721.800,00
5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen Rekapitulasi dan Hasil Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	Mataram	4	103.700.000,00	APBD	Baru	4	103.700.000,00
		Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Data Retribusi dan Pendapatan Lain-lain	Dokumen	Mataram	4					
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	Prov.NTB	12,50	530.641.800,00	APBD	Baru	15,00	534.933.500,00
5.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah kali pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga	Kali	Prov.NTB	216	272.430.300,00	APBD	Baru	216	276.722.000,00
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Data pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Mataram	1	103.004.000,00	APBD	Baru	1	103.004.000,00
5.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Mataram	12	53.004.000,00	APBD	Baru	12	53.004.000,00
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal, diklat teknis substantif, diklat teknis struktural dan fungsional	Orang	Mataram	15	50.110.000,00	APBD	Baru	15	50.110.000,00
5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pendapatan Daerah	Paket	Mataram	2	52.093.500,00	APBD	Baru	2	52.093.500,00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	Persen	Prov.NTB	100,00	7.701.469.775,00	APBD	Baru	100,00	7.701.585.025,00
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jenis	Prov.NTB	258	199.166.000,00	APBD	Baru	275	203.268.000,00
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	Prov.NTB	298	292.576.500,00	APBD	Baru	325	301.591.900,00
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket	Mataram	10	4.654.000,00	APBD	Baru	15	4.599.000,00
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	Prov.NTB	75	1.638.137.575,00	APBD	Baru	100	1.644.073.425,00
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	Prov.NTB	135	1.491.083.300,00	APBD	Baru	150	1.491.083.300,00
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	Jenis	Prov.NTB	45	102.360.000,00	APBD	Baru	50	102.360.000,00
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	Tahun	Prov.NTB	2.027	997.106.000,00	APBD	Baru	2.100	1.007.668.500,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.02.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Penyelenggaraan Rapat	Kali	Prov.NTB	144	1.869.652.000,00	APBD	Baru	150	1.838.871.500,00
5.02.01.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bahan dan alat pendukung penataan arsip	Berkas	Prov.NTB	16.000	130.664.400,00	APBD	Baru	16.500	131.999.400,00
5.02.01.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kunjungan website resmi Bappenda	Paket	Mataram	65.000	976.070.000,00	APBD	Baru	78.750	976.070.000,00
5.02.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD Penunjang	Persen	Prov.NTB	100,00	6.426.841.740,00	APBD	Baru	100,00	2.408.373.533,00
5.02.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Buah/Set	Prov.NTB	32	226.026.200,00	APBD	Baru	45	226.026.200,00
5.02.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Unit/Paket	Prov.NTB	17	474.134.000,00	APBD	Baru	20	674.284.000,00
5.02.01.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud	Paket	Mataram	8	107.521.000,00	APBD	Baru	6	107.521.000,00
5.02.01.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	Prov.NTB	1	5.619.160.540,00	APBD	Baru	1	1.400.542.333,00
5.02.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	Persen	Prov.NTB	100,00	12.164.659.000,00	APBD	Baru	100,00	12.197.909.500,00
5.02.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan	Surat	Prov.NTB	11.500	162.086.300,00	APBD	Baru	12.500	163.166.300,00
5.02.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis	Prov.NTB	44	3.727.684.000,00	APBD	Baru	44	3.800.654.500,00
5.02.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan layanan umum kantor lainnya	Orang	Prov.NTB	271	8.274.888.700,00	APBD	Baru	271	8.234.088.700,00
5.02.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	Persen	Prov.NTB	100,00	3.404.047.250,00	APBD	Baru	100,00	3.981.213.320,00
5.02.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang di pelihara dan dibayar PKBnya	Unit	Mataram	1	25.165.000,00	APBD	Baru	1	25.165.000,00
5.02.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang di pelihara dan dibayar PKBnya	Unit	Prov.NTB	190	1.746.170.200,00	APBD	Baru	180	1.728.170.200,00
5.02.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	Unit	Prov.NTB	250	641.616.200,00	APBD	Baru	250	679.906.200,00
5.02.01.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah paket aset tak berwujud	Paket	Prov.NTB	22	125.842.000,00	APBD	Baru	25	125.842.000,00
5.02.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan yg dipelihara atau direhab	Unit	Prov.NTB	134	865.253.850,00	APBD	Baru	120	1.422.129.920,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Derajat Desentralisasi (Persen)	Persen	Prov.NTB	35,20	527.520.800	APBD	Baru	36,76	527.520.800
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Persen	Prov.NTB	4,05	154.620.800,00	APBD	Baru	4,46	154.620.800,00
5.02.02.1.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Target Pendapatan Daerah (Dokumen)	Dokumen	Mataram	2	154.620.800,00	APBD	Baru	2	154.620.800,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	Persen	Prov.NTB	63,79	372.900.000,00	APBD	Baru	62,25	372.900.000,00
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan	Milyar Rp	Mataram	3.394,63	372.900.000,00	APBD	Baru	3.567,25	372.900.000,00
		Jumlah Penerimaan dana Transfer Lainnya	Milyar Rp	Mataram	70,18		APBD	Baru	86,51	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	Persen	Prov.NTB	50,12	14.946.443.600	APBD	Baru	52,03	14.608.446.100
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persen	Prov.NTB	9,91	14.946.443.600,00	APBD	Baru	14,81	14.608.446.100,00
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah target pajak daerah yang ditetapkan	Milyar Rp	Mataram	1.487,73	707.140.000,00	APBD	Baru	1.650,24	657.140.000,00
		Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Milyar Rp		470,50				553,94	
		Target Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Milyar Rp		392,25				447,22	
		Target Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Milyar Rp		272,61				262,40	
		Target Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP)	Milyar Rp		1,32				1,45	
		Target Penerimaan Pajak Rokok	Milyar Rp		351,04				385,24	
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Kajian Pajak	Dokumen	Mataram	5	2.071.784.300,00	APBD	Baru	5	2.021.784.300,00
		Jumlah Rekomendasi kesamsatan	Rekomendasi		2				2	
		Jumlah dokumen Perjanjian Kerja-sama (PKS) pelayanan pajak daerah	MoU		5				4	
		Jumlah layanan kesamsatan yang memperoleh sertifikasi ISO	Unit		1				2	
		Jumlah Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disusun	Dokumen		1				1	
		Jumlah fasilitasi Rancangan Regulasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya	Regulasi		13				11	
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah serta Pekan Pajak dan Gebyar Pajak	Kali	Prov.NTB	150	1.241.141.600,00	APBD	Baru	150	1.248.335.500,00
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan	Paket	Mataram	12	950.812.300,00	APBD	Baru	12	950.812.300,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		informasi pendapatan daerah yang diadakan								
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor	Obyek	Prov.NTB	1.644.206	1.558.401.100,00	APBD	Baru	1.766.130	1.420.609.700,00
		Jumlah Obyek Pajak Daerah Potensial	Obyek		1.008.382				1.038.936	
		Jumlah Potensi Aktif Daftar Ulang	Obyek		722.174				744.055	
		Jumlah WP Tidak Melakukan Daftar Ulang (TMDU)	Obyek		286.209				294.881	
		Jumlah Subyek PAP yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan Air Permukaan	Obyek		10				10	
		Jumlah Dokumen data potensi pajak (PBBKB, PAP dan Pajak Rokok)	Dokumen		3				3	
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Record yang diolah dan disimpan dalam Database	Obyek	Mataram	1.600.000	251.396.600,00	APBD	Baru	1.760.000	251.396.600,00
		Jumlah piranti lunak Sistem Informasi Pendapatan yang dikelola	Aplikasi		22				25	
		Jumlah paket perangkat keras yang dikelola dan dikembangkan	Paket		5				5	
		Jumlah paket peningkatan kapabilitas sumber daya pengelola sistem informasi pendapatan	Paket		3				4	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor	Obyek	Prov.NTB	121.924	1.536.835.300,00	APBD	Baru	142.250	1.536.835.300,00
		(1) Kendaraan Baru	Obyek		113.284				132.390	
		(2) Mutasi Masuk Luar Provinsi	Obyek		8.640				9.860	
		Jumlah Subyek pajak Yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak Air Permukaan	Subyek		5				5	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang Diedukasi	Orang	Prov.NTB	13.000	615.995.100,00	APBD	Baru	14.300	615.995.100,00
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	Mataram	5	217.400.000,00	APBD	Baru	5	167.400.000,00
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SP2T)	Obyek	Prov.NTB	179.358	2.019.994.600,00	APBD	Baru	183.842	2.019.994.600,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Surat Teguran Pajak dan Penagihan Pajak Daerah, Surat Teguran PKB	Obyek		76.022				77.923	
		Surat tagihan Pajak daerah (PAP); Surat Ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) PBBKB	Obyek		35				35	
5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah kasus keberatan pajak daerah yang ditindak lanjuti	Kasus	Mataram	3	146.616.000,00	APBD	Baru	3	146.616.000,00
		Jumlah Sinkronisasi data/ tindak lanjut hasil temuan/ sengketa pajak daerah dan retribusi daerah (Dok)	Dokumen		4				4	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Sentra Layanan Kesamsatan yang Nilai persepsinya sangat baik	Samsat	Prov.NTB	4	3.203.220.700,00	APBD	Baru	6	3.145.820.700,00
		Laporan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Operasi Sadar Pajak Kendaraan Bermotor	Dokumen		6				12	
		Jumlah Kendaraan Bermotor yang terjaring Operasi Sadar Pajak Kendaraan Bermotor	Obyek		27.169				30.739	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tunggakan Pajak, Retribusi dan PLL	Dokumen		4				4	
		Menurunnya Jumlah Notice Pajak Yang dibatalkan/kesalahan	Lembar		2.500				2.250	
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	Mataram	2	425.706.000,00	APBD	Baru	1	425.706.000,00



BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Bappenda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 merupakan rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Gubernur NTB. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RAPBD.

Dokumen Renja Bappenda Provinsi NTB ini juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana masa depan yang sesuai dengan urutan pilihan serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan dan sub kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Rencana Kerja ini juga merupakan Rencana pencapaian Kinerja Tahunan sebagai salah satu alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk antara lain:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan;
2. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
3. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Bappenda Provinsi NTB ini, diharapkan dapat terkoordinasi, terintegrasi, tersinkronisasi, sinergis dan berkelanjutan serta terwujudnya komunikasi antar OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun dengan instansi/ lembaga terkait yang membidangi fungsi lain.

Akhirnya dengan diselesaikannya penyusunan dokumen Rencana Kerja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2021 dapat bermanfaat bagi seluruh komponen beserta para pihak yang melaksanakan Program dan Kegiatan, serta dokumen ini harus menjadi acuan dalam proses perencanaan Bappenda Provinsi NTB tahun berikutnya baik dalam rangka penyusunan KUA/PPAS; penyusunan RKA/DPA maupun penetapan strategi dan kebijakan serta pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021.